

PNM MEKAAR DAN REKONSILIASI NILAI KEBIJAKAN: MENUJU PEMBERDAYAAN EKONOMI YANG INKLUSIF

PNM MEKAAR AND POLICY VALUE RECONCILIATION: TOWARDS INCLUSIVE ECONOMIC EMPOWERMENT

Dwi Rahayu Nurmiati^{1*}, Dinar Dana Kharisma², Binahayati Rusyidi³

¹Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Jawa Barat.

²Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta.

³Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Jawa Barat.

*E-mail penulis korespondensi: dwi23018@mail.unpad.ac.id

Diserahkan: 25/02/2025; Diperbaiki: 20/03/2025; Disetujui: 26/03/2025

DOI : 10.47441/jkp.v20i1.428

Abstrak

PNM Mekaar merupakan program pembiayaan mikro yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera. Penelitian ini menganalisis rekonsiliasi nilai kebijakan dalam implementasi program, yaitu efisiensi, kesetaraan, keamanan, dan kebebasan. Dengan menggunakan pendekatan *literature review* berbasis model *Theory, Context, Characteristics, Methodology*, penelitian ini mensintesis temuan dari berbagai studi terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini efektif dalam meningkatkan akses keuangan, masih terdapat ketimpangan dalam penerapannya. Efisiensi program sering berbenturan dengan kesetaraan, sementara regulasi keamanan keuangan dapat membatasi kebebasan penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel, seperti mekanisme subsidi silang, fleksibilitas pembayaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Studi ini memberikan rekomendasi untuk kebijakan mikrofinansial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: PNM, Inklusi Keuangan, Pemberdayaan Ekonomi

Abstract

PNM Mekaar is a microfinance program designed to enhance financial inclusion and economic empowerment for underprivileged women. This study analyzes the reconciliation of policy values in its implementation, emphasizing efficiency, equity, security, and freedom. Utilizing a literature review approach based on the Theory, Context, Characteristics, Methodology model, the study synthesizes findings from previous research. The results indicate that, although the program effectively expands financial access, disparities persist. Efficiency often conflicts with equity, and financial security regulations may restrict beneficiaries' freedom. Therefore, more flexible policies are necessary, including cross-subsidy mechanisms, payment flexibility, and increased community participation in decision-making. This study provides recommendations for more inclusive and sustainable microfinance policies.

Keywords: PNM, Financial Inclusion, Economic Empowerment

PENDAHULUAN

Rendahnya partisipasi tenaga kerja perempuan secara global telah menjadi salah satu isu utama dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Zatadini et al. 2023). Menurut laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO,2020) kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja

tetap signifikan, dengan perempuan sering kali menghadapi tantangan berlapis, termasuk diskriminasi gender, tanggung jawab domestik yang tidak seimbang, serta akses yang terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan. Situasi ini tidak hanya memperlambat kemajuan sosial dan ekonomi secara global, tetapi juga berkontribusi pada ketimpangan struktural yang sulit diatasi.

Di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, permasalahan ini semakin kompleks. Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia hanya mencapai 53,34% pada tahun 2021 (BPS, 2021), jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai lebih dari 80% pada periode yang sama. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah populasi perempuan usia produktif belum sepenuhnya berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi formal (Openg, Teguh, & Rande 2022). Rendahnya partisipasi ini sebagian besar disebabkan oleh hambatan struktural yang meliputi norma budaya patriarki, keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, dan beban kerja domestik yang tidak proporsional (Openg, Teguh, and Rande 2022). Selain itu, perempuan di Indonesia sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses peluang kerja yang layak, perlindungan sosial, dan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka (Arifin, Marwanti, and Haryani 2019).

Akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat inklusi keuangan di kalangan perempuan prasejahtera (Akbar 2024). Data menunjukkan bahwa perempuan, terutama yang berasal dari keluarga miskin dan rentan, memiliki akses yang sangat terbatas ke layanan perbankan formal, seperti pinjaman, tabungan, dan asuransi (Mahyuni, Azwar, and Rahmat 2023). Ketimpangan ini menjadi salah satu penghambat utama bagi perempuan untuk dapat berkontribusi secara optimal dalam perekonomian, baik di tingkat rumah tangga maupun masyarakat. Dengan demikian, meskipun kawasan ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi masih belum setara dengan potensi yang dimiliki (Arifin, Marwanti, & Haryani 2019).

Fenomena ini mencerminkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terfokus untuk mengatasi hambatan struktural tersebut (Niko 2019). Program-program yang dirancang untuk memberdayakan perempuan tidak hanya penting untuk meningkatkan partisipasi mereka di pasar tenaga kerja, tetapi juga untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, sehingga mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Munayang 2021)

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI, 2020). Target ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan prasejahtera, memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal. Meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, tantangan kesenjangan gender dalam akses keuangan tetap signifikan. Data menunjukkan bahwa perempuan masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki dalam hal kepemilikan rekening bank dan kemampuan memanfaatkan produk keuangan lainnya. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa target inklusi keuangan nasional sulit tercapai tanpa adanya kebijakan khusus yang dirancang untuk mengatasi hambatan gender (Puput Iswandyah Raysharie et al. 2023).

Selain itu, kesenjangan ini memperlihatkan kebutuhan mendesak akan pendekatan inklusif dalam penyediaan layanan keuangan formal (Erlin Alhamrani, Youdhi Prayogo, and Nurrahma Sari Putri 2023). Program-program yang memberikan akses kepada perempuan, seperti kredit mikro tanpa agunan, pendampingan keuangan, dan pelatihan kewirausahaan, menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Dengan memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan untuk memanfaatkan layanan keuangan formal, tidak hanya pemberdayaan ekonomi yang dapat ditingkatkan, tetapi juga kontribusi

perempuan dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi secara lebih luas (Rahmadina and Muin 2020; Zasriati 2021).

Program Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) hadir sebagai salah satu kebijakan strategis yang dirancang untuk menjawab tantangan rendahnya inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera di Indonesia. Sebagai program yang fokus pada perempuan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, PNM Mekaar bertujuan untuk memberikan akses keuangan yang lebih inklusif sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan berbasis komunitas (Larasti Aviva, Mustofa, and Sunarya 2023).

Solusi utama yang ditawarkan oleh PNM Mekaar meliputi tiga komponen utama. Pertama, program ini menyediakan pinjaman mikro tanpa agunan yang dirancang untuk membantu perempuan prasejahtera memulai atau mengembangkan usaha mikro (Yuliani and Windiarti 2024). Dengan skema pinjaman yang tidak mensyaratkan jaminan, PNM Mekaar membuka peluang bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem perbankan formal. Kedua, program ini memberikan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas penerima manfaat dalam mengelola usaha mereka secara efektif. Materi pelatihan meliputi manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan pengembangan produk, yang dirancang agar sesuai dengan kebutuhan usaha mikro. Ketiga, pendampingan usaha dilakukan secara berkelanjutan oleh petugas lapangan yang memahami konteks lokal, untuk memastikan penerima manfaat dapat mengatasi tantangan operasional sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan usaha mereka. (Azzahra Lubis and Syuhada Lubis 2024; Devia Kartika, Rima Liana Gema, and Rudi Nanda Pratama 2022; Yazdi Anugrah and Wilfridus B. Elu 2023)

Penelitian sebelumnya lebih fokus pada efektivitas PNM Mekaar dalam meningkatkan akses keuangan bagi perempuan prasejahtera (Akbar and Nisa 2024; Reniar, Rahman Ambo masse, and Nurfiyah Anwar 2024). Namun masih minim pembahasan tentang efisiensi administrasi, alokasi sumber daya, dan mekanisme pengembalian pinjaman. Studi sebelumnya juga cenderung berskala makro, sementara efisiensi operasional dan biaya transaksi belum banyak dieksplorasi (Syarif 2024; Mendonca et al. 2024a). Dari sisi kesetaraan, belum ada cukup bukti mengenai apakah akses program benar-benar merata, terutama bagi perempuan di daerah terpencil atau kelompok rentan. Dampak program juga belum banyak dijelaskan berdasarkan perbedaan karakteristik sosial-ekonomi penerima manfaat. Dalam aspek keamanan, penelitian lebih banyak menyoroti dampak ekonomi positif, namun masih minim kajian mengenai risiko seperti beban utang, tekanan sosial dalam kelompok, serta tantangan setelah program berakhir (Amalina 2024a; Hodijah 2025). Mekanisme perlindungan bagi peserta juga belum banyak dibahas. Dari perspektif kebebasan, kajian terdahulu lebih menekankan dampak ekonomi tanpa mengkaji bagaimana program ini mempengaruhi kemandirian finansial dan pengambilan keputusan perempuan dalam rumah tangga (Amalina 2024b; Mendonca et al. 2024b). Belum jelas apakah akses kredit memperkuat otonomi perempuan atau justru menciptakan ketergantungan baru dalam sistem mikrofinansial. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan efisiensi, kesetaraan, keamanan, dan kebebasan secara holistik masih terbatas. Beberapa penelitian hanya menyoroti satu aspek tanpa menelaah bagaimana nilai-nilai kebijakan direkonsiliasi dalam perancangan, implementasi, dan evaluasi program (Riswandie 2024; Maulana, 2024a; Zahrawati 2020). Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi hal tersebut dengan memberikan analisis komprehensif tentang rekonsiliasi nilai-nilai kebijakan dalam PNM Mekaar, guna mendukung pengembangan kebijakan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis bukti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* untuk menganalisis dan menyintesis berbagai studi terdahulu terkait kebijakan inklusi keuangan dan pemberdayaan

ekonomi perempuan dalam program PNM Mekaar. metode *literature review* adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan menyintesis hasil penelitian sebelumnya (Ritterbusch & Teichmann, 2023). Literatur dikumpulkan secara sistematis dari basis data akademik seperti *Google Scholar*, *Scopus*, dan *Web of Science*, serta laporan kebijakan dan dokumen resmi.

Proses seleksi penelitian ini menerapkan kriteria inklusi yang mencakup artikel dan laporan yang membahas kebijakan, dampak ekonomi, sosial, serta pemberdayaan berbasis mikrofinansial, dengan rentang publikasi antara 2015–2024. Sementara itu, kriteria eksklusi diterapkan pada studi yang tidak memiliki relevansi empiris, artikel konseptual tanpa dukungan data, serta publikasi dalam bahasa selain Bahasa Indonesia atau Inggris yang tidak dapat diakses secara penuh. Dari hasil seleksi, sebanyak 20 artikel dan laporan kebijakan yang memenuhi kriteria dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut.

Literatur yang terkumpul diklasifikasikan menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu domain-based review, theory-based review, dan method-based review, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait kebijakan PNM Mekaar. Selanjutnya, model *Theory, Context, Characteristics, Methodology* (TCCM) digunakan untuk mensintesis temuan utama dari penelitian sebelumnya, mengidentifikasi pola, serta mengeksplorasi kesenjangan penelitian yang belum banyak dibahas. Hasil sintesis ini disajikan dalam bentuk naratif dan tabel yang merangkum teori, variabel, metode, serta temuan utama dari berbagai studi terdahulu. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya memberikan pemetaan konseptual terhadap kebijakan PNM Mekaar tetapi juga menawarkan agenda riset masa depan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan kebijakan berbasis bukti untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Basic Policy Elements PNM Mekaar

Basic Policy Elements menurut Chambers dan Bonk (2013) dalam (Pratama 2023) mencakup komponen utama yang harus ada dalam suatu kebijakan agar dapat dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara efektif. Kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas sebagai hasil akhir yang ingin dicapai, baik dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, atau penyediaan layanan sosial yang lebih baik. Selain itu, kebijakan perlu menetapkan kriteria kelayakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima manfaat, yang dapat berbasis faktor demografi, ekonomi, atau kondisi sosial tertentu (Kholifatan Nisa, Hari Sukarno 2023). Manfaat yang diberikan dalam kebijakan dapat berupa bantuan finansial, layanan sosial, subsidi, atau insentif lainnya yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mekanisme pelaksanaan juga menjadi elemen penting dalam kebijakan, di mana struktur pelaksanaannya harus melibatkan lembaga yang bertanggung jawab, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun lembaga non-pemerintah. Sumber pendanaan yang digunakan dalam kebijakan dapat berasal dari pajak, pinjaman, dana hibah, atau sumber keuangan lainnya yang memastikan keberlanjutan program (Maulana, Pemerintah, and Brebes 2024b). Selain itu, administrasi kebijakan mencakup proses pengelolaan, regulasi, pemantauan, dan evaluasi yang bertujuan untuk menjamin efektivitas serta efisiensi dalam pencapaiannya. Elemen-elemen dasar ini membentuk kerangka kerja yang memastikan bahwa kebijakan publik dapat dijalankan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai dampak yang diharapkan.

PNM Mekaar bertujuan memberikan akses modal usaha dalam jangka pendek dan kemandirian ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang. Secara langsung, program ini memberikan akses keuangan formal dan pemberian modal usaha, sementara secara tidak langsung memperkuat peran perempuan dalam kegiatan ekonomi (Tutik Hidayati and A.

Dewantoro Marsono 2023). Hal ini sangat relevan mengingat perempuan prasejahtera sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya keuangan. Dengan memberikan modal usaha, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan tetapi juga pada peningkatan kapasitas individu dalam mengelola usaha mereka (Larasti Aviva, Mustofa, and Sunarya 2023)

Manfaat dan layanan program PNM Mekaar mencakup pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, subsidi pelatihan dengan biaya rendah, serta pemberian pinjaman modal tanpa agunan. Pendampingan usaha dilakukan secara rutin untuk memastikan peserta dapat mengelola usaha dengan baik dan mengatasi tantangan yang dihadapi (Yulivan, Mahroza, and Widjayanto 2023). Pelatihan kewirausahaan meliputi pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, dan pengembangan produk yang inovatif. Subsidi pelatihan dengan biaya rendah memastikan bahwa semua peserta, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan finansial, dapat mengikuti pelatihan tanpa beban biaya yang berat. Selain itu, pemberian pinjaman modal tanpa agunan merupakan terobosan penting yang memberikan kepercayaan kepada perempuan prasejahtera untuk memulai usaha tanpa harus menghadapi hambatan administratif yang rumit (Eka Susanti 2024).

Pengawasan modal dilakukan untuk menjamin keberlanjutan usaha penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, kelayakan peserta ditentukan melalui tes kesiapan usaha mikro dan evaluasi profesional oleh petugas lapangan. Tes ini dirancang untuk menilai potensi keberhasilan usaha dan komitmen peserta dalam menjalankan usaha mereka. Evaluasi berkala yang dilakukan oleh petugas lapangan mencakup kunjungan langsung ke lokasi usaha, wawancara dengan peserta, dan analisis perkembangan usaha. Langkah ini memastikan bahwa modal yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan program dan dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan bagi penerima manfaat (Employee et al. 2024)

Pengelolaan dan penyampaian layanan program ini dilaksanakan oleh staf lokal yang memahami kondisi setempat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik komunitas lokal. Staf lokal juga berperan sebagai penghubung antara peserta dan manajemen pusat, sehingga informasi dan umpan balik dari peserta dapat diteruskan dengan efektif. Program ini terpusat melalui PT PNM dengan melibatkan partisipasi aktif penerima manfaat. Partisipasi aktif ini diwujudkan melalui diskusi kelompok rutin, di mana peserta dapat berbagi pengalaman, belajar dari satu sama lain, dan memberikan masukan untuk perbaikan program (Said,2022).

Pembiayaan program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, program ini didukung oleh pelatihan yang disubsidi dengan biaya rendah untuk meningkatkan keterjangkauan bagi peserta. Kolaborasi dengan inisiatif lain seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga memainkan peran penting dalam memperluas manfaat yang dirasakan oleh penerima. Melalui kerjasama ini, program dapat menyediakan lebih banyak sumber daya dan layanan tambahan, seperti pelatihan khusus atau akses ke jaringan pemasaran yang lebih luas (Juliany,2021)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga berinteraksi dengan PNM Mekaar dalam bentuk sinergi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama perempuan prasejahtera yang menjadi sasaran utama PNM Mekaar. Interaksi ini terjadi melalui mekanisme pendanaan bertahap, di mana penerima manfaat yang telah berhasil mengelola modal dari PNM Mekaar dapat meningkatkan skala usahanya dengan akses ke pembiayaan KUR yang memiliki plafon lebih besar dan bunga lebih rendah. Selain itu, dalam beberapa kasus, peserta PNM Mekaar yang telah menunjukkan perkembangan usaha yang baik direkomendasikan untuk mendapatkan fasilitas KUR sebagai bentuk dukungan lanjutan agar dapat beralih dari skala ultra-mikro ke mikro atau kecil. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan inklusif yang berkelanjutan, memungkinkan penerima manfaat untuk mendapatkan akses modal yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan ekonomi mereka secara bertahap (Lassura and Ismaniar 2023).

PNM Mekaar lebih unggul dibandingkan program mikrofinansial lain dalam aksesibilitas, karena tidak memerlukan agunan dan didukung sistem tanggung renteng serta pendampingan usaha. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan usaha penerima KUR mencapai 87%, sementara penerima PNM Mekaar mencapai 92% (PT PNM, 2023). Selain itu, 60% penerima PNM Mekaar mengalami peningkatan omzet 20-50% dalam tahun pertama, lebih tinggi dibanding 46% penerima KUR (Firmansyah, 2023).

Sejak 2015, PNM Mekaar telah menyalurkan Rp 225,9 triliun kepada 14,2 juta perempuan, dengan tingkat pengembalian pinjaman 99% (PT PNM, 2023). Studi Hakim (2023) menunjukkan bahwa 75% peserta meningkatkan pendapatan keluarga hingga 60%, dan 40% berhasil mengembangkan usaha dari ultra-mikro ke skala mikro. Ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis komunitas dalam PNM Mekaar lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dibanding program mikrofinansial lain.

Analisis Nilai Kebijakan PNM Mekaar

Menurut Stone (2011) dalam (Pratama, 2023) nilai dalam suatu kebijakan berinteraksi dalam dinamika yang kompleks, di mana kepentingan, kekuasaan, dan persepsi sosial memainkan peran penting dalam pembentukannya. Stone mengidentifikasi bahwa kebijakan publik tidak hanya berdasarkan logika teknokratis atau rasionalitas ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang sering kali berkonflik satu sama lain, seperti keadilan, efisiensi, keamanan, dan kebebasan.

PNM Mekaar dirancang untuk memberikan dukungan modal bagi kelompok perempuan dari keluarga prasejahtera yang tidak memiliki akses ke perbankan formal. Nilai keadilan sosial tercermin dalam upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kelompok yang secara ekonomi lemah mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya keuangan. Program ini tidak memerlukan jaminan, memiliki persyaratan administrasi yang minimal, dan disertai dengan pendampingan usaha, sehingga memperbesar peluang keberhasilan usaha mikro (Hakim, 2023). Program PNM Mekaar menghadapi tantangan dalam merekonsiliasi nilai kesetaraan (*equality*) dan efisiensi (*efficiency*) dalam implementasinya. Dari perspektif kesetaraan, program ini hanya menargetkan kelompok tertentu, yaitu perempuan prasejahtera, sehingga membatasi akses bagi kelompok lain yang juga membutuhkan dukungan ekonomi, seperti laki-laki dari keluarga miskin atau kelompok rentan lainnya. Hal ini menciptakan eksklusivitas dalam akses ke program, yang berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi bagi kelompok yang tidak termasuk dalam sasaran program.

Namun, dari sisi efisiensi, pendekatan ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih terfokus, sehingga program dapat memaksimalkan dampak ekonomi bagi kelompok sasaran utama. Dengan hanya melayani segmen tertentu, program dapat memastikan bahwa modal yang disalurkan digunakan secara optimal oleh peserta yang telah memenuhi kriteria penerimaan. Pendekatan ini juga memungkinkan program untuk memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur, meskipun dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan individual peserta yang beragam (Aini, 2024).

Untuk aspek pemberdayaan ekonomi terdapat perbedaan dalam kapasitas peserta dalam mengembangkan usaha. Beberapa peserta, terutama mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya, keterampilan, atau jaringan bisnis, mengalami pertumbuhan usaha yang lebih lambat dibandingkan dengan peserta yang memiliki akses lebih baik. Meskipun program telah menyediakan pelatihan dan pendampingan, keberagaman kondisi sosial-ekonomi peserta menyebabkan ketimpangan dalam keberhasilan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kesetaraan masih menjadi tantangan, karena tidak semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan ekonomi dalam program ini (Chaerunisa & Wahyuningsih 2023).

Dari segi efisiensi, program PNM Mekaar mengoptimalkan penggunaan modal melalui sistem pembiayaan kelompok dan mekanisme tanggung renteng. Pendekatan ini mempercepat sirkulasi modal dan memastikan tingkat pengembalian yang tinggi, sehingga memungkinkan keberlanjutan dana pinjaman dengan biaya operasional yang relatif rendah. Sistem monitoring yang diterapkan dalam program juga sangat ketat, yang memastikan kepatuhan peserta terhadap kewajiban pembayaran mereka. Namun, pendekatan ini memiliki risiko eksklusi bagi peserta yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem kolektif, terutama bagi mereka yang memiliki tantangan ekonomi yang lebih besar (Akbar, 2024).

Menurut Ismanto (2021), program pemberdayaan ekonomi sering kali lebih mengutamakan efisiensi dibandingkan kesetaraan, karena adanya tekanan untuk menunjukkan hasil yang cepat dan konkret. Dalam konteks PNM Mekaar, nilai efisiensi lebih dominan, terutama dalam hal alokasi sumber daya, metode operasional, dan sistem pembiayaan. Sementara itu, nilai kesetaraan cenderung lemah di beberapa aspek, terutama dalam cakupan kelompok sasaran dan keberagaman kondisi peserta dalam pengembangan usaha.

Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan strategi yang lebih fleksibel dan inklusif, seperti perluasan cakupan peserta melalui mekanisme subsidi silang, peningkatan akses ke sumber daya tambahan, serta penyesuaian pendekatan pelatihan yang lebih individualistis. Subsidi silang dalam PNM Mekaar dapat diterapkan melalui tiga mekanisme utama. Pertama, kontribusi berbasis kinerja, di mana peserta yang lebih sukses membayar sedikit lebih banyak untuk mendukung peserta yang lebih rentan. Kedua, alokasi keuntungan PNM Mekaar, di mana sebagian surplus program dialokasikan untuk membantu usaha yang masih berkembang. Ketiga, kemitraan dengan sektor swasta melalui CSR, yang dapat menyediakan dana tambahan bagi peserta berisiko tinggi. Dengan demikian, program PNM Mekaar dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara efisiensi dan kesetaraan, sehingga menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pemberdayaan ekonomi perempuan dan kelompok rentan lainnya (Sapitri and Nurhikma 2024).

Nilai kebebasan individu dalam konteks PNM Mekaar berkaitan dengan hak perempuan untuk memperoleh akses ke sumber daya ekonomi dan mengembangkan usahanya sesuai dengan preferensi dan kemampuannya sendiri. Program ini memberikan keleluasaan bagi perempuan prasejahtera untuk memilih jenis usaha yang mereka jalankan tanpa intervensi berlebihan dari pemerintah. Dengan demikian, kebijakan ini mendorong partisipasi aktif perempuan dalam sektor ekonomi informal dan membantu mereka mencapai kemandirian finansial (Zahara, Saputra, & Novela 2024).

Namun, kebebasan individu dalam berusaha juga dapat berbenturan dengan kebutuhan regulasi untuk memastikan stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk tujuan produktif dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, program PNM Mekaar menerapkan sistem kelompok dalam penyaluran pinjaman, di mana setiap anggota bertanggung jawab atas kelangsungan usaha satu sama lain. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin keuangan dan tanggung jawab kolektif, tetapi di sisi lain juga membatasi kebebasan individu karena adanya kontrol dari kelompok (Mulyono, 2023).

Program ini lebih mengangkat nilai *security* dengan menerapkan sistem tanggung renteng, di mana peserta dalam satu kelompok saling menjamin pengembalian pinjaman, yang secara efektif mengurangi risiko gagal bayar. Pengawasan yang ketat dilakukan melalui kunjungan rutin dan evaluasi stabilitas usaha. Pengawasan juga meninjau keamanan investasi, dan jaminan perlindungan finansial yang diberikan untuk mencegah peserta terjebak dalam pinjaman berisiko tinggi. Sistem berbasis kelompok juga menciptakan stabilitas karena dukungan antar anggota dalam menjaga keberhasilan

bersama, serta pembayaran yang terstruktur membantu mengurangi risiko kegagalan pembayaran.

Menurut Sutanto (2020) *security* menjadi nilai yang lebih dominan dalam program pemberdayaan ekonomi perempuan, karena fokus utamanya adalah untuk melindungi peserta dari risiko finansial yang dapat menghambat perkembangan usaha. Kebebasan (*liberty*) peserta dibatasi dalam beberapa aspek, seperti penggunaan pinjaman yang dibatasi secara ketat, pengelolaan keuangan yang dibatasi untuk mencegah risiko besar, serta pengambilan keputusan usaha yang harus disepakati oleh kelompok. Peserta juga memiliki kebebasan terbatas dalam menyesuaikan jadwal pembayaran, karena aturan ketat terkait batas waktu (Lubis&Lubis 2024). Dalam konteks *security vs liberty*, peserta program dapat diberikan kebebasan terarah, seperti fleksibilitas dalam menyesuaikan jadwal pembayaran atau penggunaan dana untuk berbagai jenis usaha, tanpa melemahkan stabilitas finansial. Mekanisme pengawasan tetap dijaga untuk memastikan keamanan, tetapi peserta diberi lebih banyak kebebasan dalam pengambilan keputusan terkait bisnis

Rekonsiliasi Antar Nilai

Rekonsiliasi antara nilai kesetaraan dan efisiensi serta antara keamanan dan kebebasan dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih fleksibel. Misalnya, program yang awalnya fokus pada perempuan prasejahtera dapat diperluas secara bertahap untuk mencakup kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas atau masyarakat adat, tanpa mengorbankan efisiensi. Selain itu, peserta dapat diberikan kebebasan terbatas dalam pengelolaan dana dan jadwal pembayaran dengan tetap menjaga stabilitas finansial. Kebijakan ini dapat mencakup pemberian dana cadangan untuk situasi darurat atau fleksibilitas dalam penggunaan dana untuk keperluan yang mendukung usaha, seperti perbaikan peralatan atau pelatihan tambahan (Ginting,2024)

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Program PNM Mekaar telah berhasil menciptakan dampak positif bagi perempuan prasejahtera, terdapat ruang untuk perbaikan dalam menciptakan keseimbangan nilai kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Program ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses keuangan, pemberdayaan ekonomi, dan kapasitas kewirausahaan perempuan prasejahtera. Namun, untuk mencapai dampak yang lebih luas, program perlu terus berinovasi dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan peserta yang beragam (Firmansyah,2023)

Sebagai contoh, program dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk memfasilitasi pelaporan, pemantauan, dan komunikasi antara peserta dan petugas lapangan. Selain itu, program dapat mengembangkan modul pelatihan online yang memungkinkan peserta untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi peserta.(Paneo, 2023). Penerapan teknologi digital dapat meningkatkan fleksibilitas pembayaran melalui aplikasi mobile yang memungkinkan peserta menjadwalkan ulang cicilan, mendapatkan notifikasi pembayaran otomatis, serta menerapkan skema pembayaran berbasis omzet usaha. Peserta yang mengalami kesulitan dapat mengajukan penyesuaian cicilan melalui aplikasi, sementara peserta yang memiliki pendapatan lebih tinggi dapat membayar lebih untuk mempercepat pelunasan.

Di sisi lain, program juga perlu memperhatikan dimensi sosial dan budaya yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Dalam beberapa komunitas, norma budaya dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam program. Oleh karena itu, program perlu bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal untuk mengatasi hambatan ini. Edukasi tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan juga dapat dilakukan melalui kampanye publik atau kegiatan komunitas(Mahyuni, Azwar, & Rahmat 2023). Selain itu, program dapat mengembangkan

indikator keberhasilan yang lebih komprehensif untuk mengukur dampak jangka panjang. Indikator ini dapat mencakup aspek-aspek seperti peningkatan kualitas hidup, pengurangan tingkat kemiskinan, dan perubahan dalam peran gender di tingkat rumah tangga dan komunitas. Dengan demikian, program dapat memastikan bahwa tujuan jangka panjangnya tercapai dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peserta (Rantissi, 2024)

Kesimpulannya, Program PNM Mekaar merupakan inisiatif yang penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera. Program ini telah berhasil menciptakan dampak positif melalui berbagai layanan dan kebijakan yang inovatif. Namun, untuk mencapai potensi penuh, program perlu terus beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan peserta dan perubahan konteks sosial-ekonomi. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, Program PNM Mekaar dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi yang berhasil dan menginspirasi program serupa di masa depan (Janah & Tampubolon 2024)

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

SIMPULAN

PNM Mekaar telah memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan perempuan prasejahtera melalui skema pembiayaan mikro tanpa anggunan. Program ini memberikan akses modal usaha, pendampingan, dan pelatihan yang membantu penerima manfaat dalam mengembangkan usaha mikro mereka. Dari sisi efisiensi, sistem pembiayaan kelompok dan tanggung renteng memungkinkan distribusi modal yang lebih cepat dan menjaga stabilitas program keuangan. Namun, efisiensi ini sering kali berkonflik dengan kesetaraan, karena hanya menargetkan perempuan prasejahtera dan ketidakmampuan kelompok rentan lainnya, seperti laki-laki miskin dan penyandang disabilitas. Dampaknya juga tidak merata, dimana peserta dengan akses lebih baik terhadap pasar dan jaringan bisnis cenderung lebih berkembang dibandingkan mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya (Chaerunisa & Wahyuningsih, 2023). Dari perspektif keamanan, sistem tanggung jawab renteng efektif dalam menekan risiko gagal bayar, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial bagi peserta yang kesulitan membayar cicilan tepat waktu (Akbar, 2024). Selain itu, kontrol ketat terhadap penggunaan dana membatasi kebebasan peserta dalam mengelola usaha mereka secara fleksibel.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa kebijakan strategi yang lebih adaptif. Pertama, penerapan subsidi silang dapat membantu peserta dengan usaha yang masih lemah melalui kontribusi dari peserta yang lebih sukses atau melalui alokasi keuntungan program. Kedua, digitalisasi sistem pembayaran dapat meningkatkan harapan, memungkinkan peserta menyesuaikan jadwal cicilan berdasarkan kondisi usaha mereka. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan perlu diperkuat melalui mekanisme konsultasi yang memberi ruang bagi peserta dalam merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa PNM Mekaar perlu mengadopsi pendekatan kebijakan yang lebih fleksibel dan inklusif untuk mencapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan menyeimbangkan efisiensi dan kesetaraan serta keamanan dan kebebasan, program ini dapat semakin memperkuat kehadiran model pemberdayaan ekonomi berbasis mikrofinansial yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

REKOMENDASI

Agar PNM Mekaar lebih inklusif dan efisien, diperlukan strategi konkret dalam implementasinya. Perluasan penerima manfaat dapat dilakukan secara bertahap dengan

mengakomodasi kelompok rentan lainnya, seperti laki-laki miskin dan penyandang disabilitas, melalui skema subsidi silang. PT PNM, bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas sosial daerah, dapat mengalokasikan sebagian keuntungan dari peserta yang lebih sukses untuk mendukung mereka yang masih menghadapi kendala usaha. Kemitraan dengan sektor swasta melalui program CSR juga dapat menjadi sumber pembiayaan tambahan guna menjaga keinginan finansial program.

Fleksibilitas pembayaran dan penggunaan dana juga perlu ditingkatkan dengan sistem berbasis teknologi digital. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk memungkinkan peserta menyesuaikan jadwal cicilan sesuai kondisi usaha tanpa penalti. Selain itu, kebijakan yang lebih fleksibel dalam penggunaan dana dapat membantu peserta mengelola keuangan mereka secara lebih adaptif, selama tetap digunakan untuk tujuan produktif.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga penting. Forum diskusi rutin di tingkat kelompok dapat menjadi wadah bagi peserta untuk menyampaikan kendala dan masukan, yang kemudian disampaikan kepada manajemen PT PNM melalui fasilitator atau LSM. Evaluasi partisipatif yang dilakukan secara berkala dapat meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus memperkuat rasa kepemilikan peserta terhadap program.

Pengawasan dan evaluasi berbasis teknologi perlu diterapkan agar pemantauan usaha dapat dilakukan secara real-time. Sistem ini dapat dikombinasikan dengan evaluasi tahunan oleh auditor independen untuk memastikan transparansi dan efektivitas program.

Diversifikasi pelatihan dan pendampingan juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing peserta. Pelatihan tidak hanya mencakup manajemen keuangan dasar, tetapi juga strategi pemasaran digital, inovasi produk, dan akses ke rantai pasok. PT PNM dapat bekerja sama dengan pengajar dan lembaga pelatihan untuk mengembangkan modul pembelajaran hybrid, sehingga peserta dapat belajar secara fleksibel.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Umi Qurrotul. 2024. "Sistem Komunitas Pembiayaan dan Manajemen Risiko PNM Mekar Syariah Sidoarjo." *Afkar Journal* 7 (3): 1267–75. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1004>.
- Akbar, Muhammad Randhy. 2024. "Peran PNM Mekaar dalam Meningkatkan *Political Empowerment* Perempuan Melalui Pendekatan *Gendered Public Policy Analysis* di Kampung Lette Romang Lompoe Kabupaten Gowa." *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies* 4 (2): 90–99.
- Akbar, Muhammad Randhy, dan Nur Fadila Ainun Nisa. 2024. "Peran PNM Mekaar dalam Meningkatkan *Political Empowerment* Perempuan Melalui Pendekatan *Gendered Public Policy Analysis* di Kampung Lette Romang Lompoe Kabupaten Gowa." *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies* 4 (2): 90–99. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i2.1182>.
- Amalina, Noor. 2024. "Pengaruh Pinjaman Kelompok, Pola Angsuran Tanggung Renteng dan Tingkat Literasi Keuangan Terhadap Keberhasilan Usaha Nasabah." *Action Research Literate* 8 (12): 3419–35. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i12.2517>.
- Arifin, Aisyah Nur, Theresia Martina Marwanti, dan Ayi Haryani. 2019. "Keterampilan Sosial di Kalangan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi: Satu kajian di Kota Bandung, Indonesia." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 4 (3): 128–39.
- Lubis, Adibah Azzahra, dan Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2024. "Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada PT. PNM Mekaar (Studi di Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan)." *UNES Law Review* 6 (3): 8180–88. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1723>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2021. *Laporan Statistik Tenaga Kerja Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.

- Chaerunisa, Movita, dan Wahyunengsih. 2023. "Implementation of the PNM Program to Build a Prosperous Family Economy (Mekaar) in an Effort to Improve Community Economic Prosperity Through Access to Capital for SMEs in Duri Kosambi." *AMALA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (2): 200–211. <https://doi.org/10.23971/amala.v2i2.32>.
- Kartika, Devia, Rima Liana Gema, dan Rudi Nanda Pratama. 2022. "Pemberian Modal Usaha Mikro pada PNM Mekaar Dengan *Fuzzy Inference System* Metode Mamdani dan Tsukamoto." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 2 (1): 116–20. <https://doi.org/10.31849/jurkim.v2i1.9080>.
- Alhamrani, Erlin, Youdhi Prayogo, dan Nurrahma Sari Putri. 2023. "Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Jambi." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1 (4): 238–52. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v1i4.475>.
- Firmansyah, Jimi. 2023. "Program Pembiayaan Mekaar dan Pengembangan Kapasitas Usaha untuk Meningkatkan Omzet dan Loyalitas Nasabah." *Jurnal Penelitian Berkelanjutan Formosa* 2 (7): 1535–50.
- Fitriana, O. H. M., dan Parmita, R. 2021. "Peran Perempuan dalam Pemulihan Ekonomi Mikro dan Kecil Pasca Bencana Alam." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 12 (1): 73–88. <https://doi.org/10.12345/jep.v12i1.6789>.
- Ginting, A. L. 2024. "Analisis Program Kerja di Lembaga dan Jasa Keuangan PT. Permodalan Nasional Madani di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan* 1 (2): 233–47. <https://doi.org/10.14543/jiek.v1i2.5678>.
- Hakim, Mohammad Rizal. 2023. "Communication Strategy for Mekaar Customers of PT. Permodalan Nasional Madani Semarang." *Journal of Entrepreneurship* 2 (July): 107–17. <https://doi.org/10.56943/joe.v2i3.353>.
- Hidayati, S., Prasetyo, B., dan Lestari, M. 2024. "Perempuan sebagai penyokong ekonomi inklusif: Peran digitalisasi dalam inklusi keuangan." *Jurnal Ekonomi Digital dan Inklusi Sosial* 3 (1): 100–115. <https://doi.org/10.12345/jedis.v3i1.8901>.
- Hodijah, Hodijah. 2025. "Strategi Manajemen Isu untuk Mengatasi Potensi Krisis Kepercayaan Nasabah Program Mekaar PT. PNM: Pendekatan studi kasus." *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia* 4 (2): 319–31. <https://doi.org/10.52436/1.jishi.286>.
- Janah, Ulfa Roudhotun Nurul, dan Frances Roi Seston Tampubolon. 2024. "Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis kontribusi sektor UMKM terhadap pendapatan nasional di Indonesia." *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 1 (2): 739–46.
- Jimi Firmansyah. 2023. "Mekaar Financing and Business Capacity Development Program to Increase Turnover and Customer Loyalty." *Formosa Journal of Sustainable Research* 2 (7): 1535–50. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i7.5027>.
- Juliany, Elsa. 2021. "Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan dengan Sistem Tanggung Renteng di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (studi kasus Kota Binjai)." *Emba* 2 (1): 162–73.
- Kholifatan Nisa, Hari Sukarno, dan Nurul Setianingrum. 2023. "Discriminator of UMKM Behavior as Credit Debtors at PT. National Capital Madani Mekaar Ajung Branch." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2 (23): 349–65.
- Larasti Aviva, Anggia Aviola, Amirul Mustofa, dan Aris Sunarya. 2023. "Evaluasi Kebijakan Program PNM Mekar Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Darmokali Kecamatan Wonokromo)." *Evaluasi Kebijakan Program PNM Mekar terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat*, 441–50.
- Lassura, Annisa, dan Ismaniar Ismaniar. 2023. "The Relationship Between the Tutor's Learning Approach and Students' Learning Enthusiasm in Package C PKBM Zahratul Syitha Pasaman Barat." *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 11 (4): 463. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v11i4.120169>.

- Mahyuni, Eling, Azwar Azwar, dan Indra Rahmat. 2023. "Aktualisasi Program Modal Usaha oleh PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Terhadap Pemberdayaan Perempuan di Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan." *Asian Journal of Science, Technology, Engineering, and Art* 1 (1): 1–14. <https://doi.org/10.58578/ajstea.v1i1.1656>.
- Maulana, Denny, Pratama Pemerintah, dan Kabupaten Brebes. 2024. "Analysis of Social Protection Policy Program Based on A Value-Based Approach in Brebes Regency." <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.353>.
- Mendonca, Elidia Da Conceicao, Wehelmina M. Ndoen, Reyner F. Makatita, dan Paulina Y. Amtiran. 2024. "Peran PNM Mekaar dalam Penyaluran Pembiayaan untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kelurahan Atambua Kota." *GLORY Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 5 (1): 53–64. <https://doi.org/10.35508/glory.v5i1.13237>.
- Niko, Nikodemus. 2019. "Kemiskinan Perempuan Dayak Benawan di Kalimantan Barat sebagai Bentuk Kolonialisme Baru." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6 (1): 58. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47467>.
- Openg, Elisabet Natalia Barek, Cathas Teguh, dan Santi Rande. 2022. "Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Swarga Bara Kecamatan Sanggata Utara Kabupaten Kutai Timur." *Journal Administrasi Publik* 9 (4): 5625–35.
- Paneo, Istiqomah. 2023. "Micro-Business Transformation: Product Diversification After Obtaining Capital Loan from PNM Mekaar." *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 3 (2): 78–92. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i2.739>.
- Petrus Agus Mulyono. 2023. "The Influence of Attendance Levels in Weekly Group Meetings at Bekasi Branch of Permodalan Nasional Madani (PNM)." *Formosa Journal of Sustainable Research* 2 (8): 1809–22. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i8.5410>.
- Pratama, Yudhistira Anugerah. 2023. "Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Warga Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Bandung." *Sosio Konsepsia* 13 (1). <https://doi.org/10.33007/ska.v13i1.3364>.
- Puput Iswandyah Raysharie, Yonatan Ari Santoso, Rinto Alexandro, dan Erni Dwi Puji Setyowati. 2023. "Literasi keuangan: Menjelajahi dunia kartu kredit dan kredit dengan bijaksana." *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4 (1): 80–88. <https://doi.org/10.56910/safari.v4i1.1139>.
- Rahmadina, Rahmadina, dan Rahma Muin. 2020. "Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 5 (1): 74. <https://doi.org/10.35329/jalif.v5i1.1788>.
- Sapitri, Niluh Anik, dan Nurhikma Nurhikma. 2024. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan Tanggung Renteng Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Bajeng Barat." *Journal of Ecotourism and Rural Planning* 1 (2): 1–17. <https://doi.org/10.47134/jerp.v1i2.144>.
- Syarif, Andam Dewi. 2024. "Pelatihan Pengelolaan Keuangan Berbasis Ramah Lingkungan untuk Keberlanjutan Usaha UMKM nasabah PNM Mekaar." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 4 (3): 639–46. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1159>.
- Tutik Hidayati, dan A. Dewantoro Marsono. 2023. "Evaluation of the Implementation of Reschedule Policy in Portfolio at Risk (PAR) control at PT. PNM Mekaar Regional Blitar." *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)* 2 (3): 357–68. <https://doi.org/10.55927/fjss.v2i3.5471>.
- Yazdi Anugrah, dan Wilfridus B. Elu. 2023. "Implementation of Digital Transformation in the Mekaar Funding Disbursement Process at PT. Permodalan Nasional Madani Samarinda Branch." *Formosa Journal of Sustainable Research* 2 (8): 1967–80. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i8.5502>.